
ANALISIS KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Saddam Tubaka

Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Pattimura
Jl. Dr. Tamaela, Kel Urimesing, Nusaniwe, Kampus PGSD, Ambon, 97114, Indonesia
(sadamambon2019@gmail.com)

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the effect of economic growth, income distribution, unemployment, education and health on poverty in Eastern Indonesia in 2013-2017. Independent variables used in this study are economic growth, income distribution, unemployment, education and health and poverty as dependent variable. The data used in this study are secondary data sourced from the Central Statistics Agency of Maluku Province consisting of time series data for 2013 - 2017 and cross section data for 12 provinces in Eastern Indonesia. The analytical method used is panel data regression analysis. The results showed that economic growth had a positive and not significant effect on poverty in Eastern Indonesia. Variable income distribution has a positive and not significant effect on poverty in Eastern Indonesia. The unemployment variable has a positive and significant effect on the poverty variable in Eastern Indonesia. Education and health variables have a positive and significant effect on poverty in Eastern Indonesia. The coefficient of determination is 0.993136, meaning that the poverty variable can be explained by variables of economic growth, income distribution, unemployment, education and health by 99.31%. Simultaneous test results (F test), showed variables of economic growth, income distribution, unemployment, education and health simultaneously had a significant effect on poverty in Eastern Indonesia.

Keywords: Poverty, Economic Growth, Income Distribution, Unemployment, Education, Health.

JEL Classification : I32, F43, D33, E24, I20, I10.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah di negara manapun baik di negara berkembang maupun negara maju. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. (BPS, 2008:1).

Berdasarkan Pemendagri No.56-2015 tentang kodefikasi dan tata wilayah administrasi per provinsi menyebutkan jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi. Provinsi-provinsi tersebut terbagi menjadi dua kawasan yang kemudian kita kenal dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam perjalanannya, ternyata kedua kawasan tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa provinsi-provinsi yang terletak di Kawasan Barat Indonesia (KBI) pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang

lebih cepat dibandingkan daerah atau provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Misalnya ketersediaan infrastruktur, sarana transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan di KBI jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pembangunan ekonomi melalui desentralisasi, dimana masing-masing daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya tidak melupakan daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia dari masalah kemiskinan. Justru yang terjadi adalah sebagian besar provinsi di wilayah KTI masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional, kecuali provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2016 menampilkan 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi didominasi oleh provinsi di Kawasan timur Indonesia yaitu, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, NTB dan Sulawesi Tengah sedangkan sisanya 3 provinsi yang berada di Kawasan Barat Indonesia yaitu provinsi Aceh, Bengkulu dan Lampung.

Tabel (1) Persentase Kemiskinan menurut Provinsi di Kawasan Timur Indonesia (%)

Provinsi	Kawasan Timur Indonesia				
	2013	2014	2015	2016	2017
NTB	17,25	17,05	16,54	16,02	15,05
NTT	20,24	19,6	22,58	22,01	21,38
Sulut	8,5	8,26	8,98	8,2	7,9
Sulteng	14,32	13,61	14,07	14,09	14,22
Sulsel	10,32	9,54	10,12	9,24	9,48
Sultra	13,73	12,77	13,74	12,77	11,97
Gorontalo	18,01	17,41	18,16	17,63	17,14
Sulbar	12,23	12,05	11,9	11,19	11,18
Maluku	19,27	18,44	19,36	19,26	18,29
Malut	7,64	7,41	6,22	6,41	6,44
Papua Barat	27,14	26,26	25,73	24,88	23,12
Papua	31,53	27,8	28,4	28,4	27,76
Total	16,68	15,85	16,31	15,84	15,32

Sumber: BPS Provinsi Maluku

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat kita lihat provinsi yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi pada tahun terakhir yakni 2017 berada di provinsi Papua sebesar 27 %, kemudian disusul oleh provinsi Papua Barat sebesar 23 % dan provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 21%. Sedangkan provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang menunjukkan persentase kemiskinan tersendah yaitu berada pada provinsi 6% lebih baik daripada provinsi Sulawesi Utara dan provinsi Sulawesi Selatan yang secara factual memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik.

Sebagai cerminan kesejahteraan ekonomi dan penduduk suatu daerah maka dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi sebab pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang *familiar* dalam menentukan keberhasilan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dengan sendirinya akan menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam pembangunan. Pembangunan harus

mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian system sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003). Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang paling tertinggi di tahun 2015 yaitu sebesar 8,24%.

Sementara disisi lain, Badan Pusat Statistik tahun 2016 menyebutkan bahwa Pembangunan di Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia, sehingga pembangunan di Kawasan Timur Indonesia menjadi relatif masih jauh tertinggal. Data BPS menunjukkan bahwa 80-an persen PDB Indonesia di dominasi oleh provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia, sedangkan sisanya terdistribusi di seluruh provinsi di Kawasan Timur Indonesia (BPS,2016).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran, salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan, pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran

akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sukimo 2000).

Kualitas Sumber Daya Manusia pada dasarnya dapat diukur dengan tingkat pendidikan dan Kesehatan. Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan bangsa. Jika pendidikan suatu bangsa sudah bobrok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab pendidikan menyangkut pembangunan karakter sekaligus mempertahankan jati diri manusia. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan dapat mengakibatkan kebodohan dan kebodohan identik dengan kemiskinan (Winardi 2010, dalam <http://winardi-andalas-putro-blogspot.com>).

LANDASAN TEORITIS

Konsep dan Defenisi Kemiskinan

Kemiskinan memiliki pengertian yang beragam, namun secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang

lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan (*Wikipedia.com*, 2012).

Menurut BPS (2010), bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Disisi lain, Fernandes (2001) dalam Arsyad (2010), menambahkan tentang beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek, antara lain :

- Aspek Politik: tidak memiliki akses ke proses pengambilan Keputusan yang menyangkut hidup mereka
- Aspek sosial: tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
- Aspek ekonomi: rendahnya kualitas SDM, termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan; dan rendahnya kepemilikan atau aset fisik, termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan
- Aspek budaya atau nilai: terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti seperti rendahnya etos kerja, berfikir pendek dan mudah menyerah.

Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi

kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Menurut BPS (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Penyebab Kemiskinan

World Bank mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan keterampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset di atas merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam kemiskinan.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok, yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. (Hemanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007).

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Hemanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007) bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah berhubungan signifikan negatif yang berarti jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemiskinan akan menurun.

Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Kemiskinan meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya investasi. Masih banyak variable kemiskinan yang melekat pada orang miskin. Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu dikembangkan karena akan sangat berpengaruh bagi program pengurangan kemiskinan di daerah berdasarkan corak dan karakteristik kemiskinan itu sendiri dan penyatuan gerak program pengurangan kemiskinan perlu dilakukan, mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang dipakai. Misalnya, Scott (1979:5) melihat kemiskinan dari sisi pendapatan rata-rata per kapita (income per capite) dan Sen (1981:22) mengkaji kemiskinan dari sudut pandang kebutuhan dasar (basic needs).

Di Indonesia, ukuran kemiskinan yang terkenal adalah yang dibuat oleh Sayogyo (1977:10) yaitu Parameter Kemiskinan. Parameter kemiskinan tersebut yang mengukur kemiskinan. Misalnya konsumsi beras per

kapita per tahun, yaitu di bawah 420 kg bagi daerah perkotaan dan 320 kg bagi daerah pedesaan. Perbedaan ini dapat kita ketahui karena jumlah penduduk yang berbeda di kedua tempat tersebut. Penduduk di perkotaan mempunyai kebutuhan yang relative lebih banyak dibandingkan penduduk di pedesaan sehingga mempengaruhi pola pengeluaran.

Selain itu, terdapat juga pandangan lain dalam melihat kemiskinan di Indonesia, misalnya mengukur kemiskinan melalui tingkat pendapatan dan pola waktunya. Kemiskinan juga dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Lembaga pengembangan sumber daya manusia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan hidup. Sementara itu, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan absolut ini umumnya disejajarkan dengan kemiskinan relatif, yang artinya adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat. Intinya membandingkan antara kelompok yang mungkin tidak miskin dengan kelompok yang relatif kaya dengan menggunakan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.

Pengangguran dan Kemiskinan

Menurut Sukimo (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila

pengangguran di suatu negara sangat buruk, kecacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Terdapat hubungan yang erat antara tingginya jumlah pengangguran, dengan jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Arsyad, 1999). Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada. Menurut Octaviani (2001), jumlah pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini.

Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. Kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin.

Pendidikan dan Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia

yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin dan Bonar, 2004).

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Dikutip dari chimobi ucha (2010) dalam jurnal internasional "Poverty in Nigeria: some dimensions and contributing factors" Beberapa faktor yg dianggap berkontribusi terhadap kemiskinan salah satu diantaranya adalah sistem pendidikan yang buruk.

Kesehatan dan Kemiskinan

Mengingat kesehatan sangat berhubungan erat dengan kemiskinan, maka komitmen untuk membangun kesehatan yang lebih baik, tentu menjadi hal utama dalam upaya mengurangi kemiskinan, (Braveman & Gruskin, 2003).

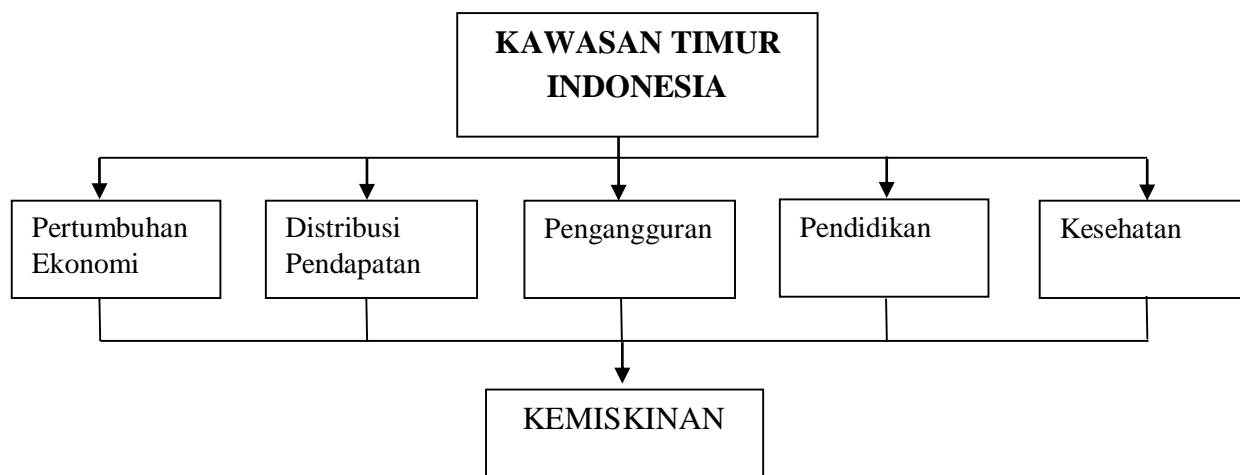
Persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan merupakan salah satu proksi ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok serta memastikan kondisi kesehatan masyarakatnya maka sangatlah penting untuk melihat persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan terakhir.

Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, Arsyad (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki

kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi.

Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis:



Gambar (1) Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2013-2017 dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai institusi (lembaga) yang relevan dengan penelitiannya. Serta menggunakan metode analisis data panel.

Analisis Regresi Data Panel

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi data panel, pertama *Pooled Least Square (Ordinary Least Square, OLS)*. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, namun hasilnya tidak memadai dikarenakan setiap observasi diperlakukan seperti observasi yang berdiri sendiri. Proses estimasi yang dapat dilakukan untuk setiap unit individu dikarenakan terdapatnya asumsi yang menyatakan bahwa komponen error pada data panel ini sama dengan komponen error dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa (OLS).

Kedua, *fixed effect (Least Square dummy variable model)*. Untuk mengatasi kesulitan terbesar dalam pendekatan metode kuadrat terkecil, kita dapat menggunakan pendekatan model efek tetap (*fixed effect*) untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan dalam *intercept-intercept* dari unit individu dan deret waktu maka digunakanlah peubah boneka (*dummy Variable*) sehingga akan terjadinya nilai parameter, baik atas unit individu maupun deret waktu.

Ketiga, *random effect (error component model, ECM)*, Model random effect disebut juga sebagai error component model karena dalam model ini, parameter yang berbeda antar individu maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error (Baltagi, 2002; Gujarati, 2003; Pindyck, 1998). Di antara ketiga teknik tersebut, pendekatan yang dipilih apakah PLS, *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effects Model (REM)* akan ditentukan melalui suatu pengujian statistik uji Chow dan uji Hausman.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai Koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka

semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 -nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan software Eviews 6.0, di peroleh hasil penelitian secara statistik dengan menggunakan medel anlisis data panel melalui pendekatan *Random Effect Model* sesuai dengan hasil uji F statistic/ uji chow dan uji hausman/ *redundant fixed effect* sebagaimana tampilan dibawah ini:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel (2) Koefisien Regresi provinsi di Kawasan Timur Indonesia

Dependent Variable: Y

C	11.36742	2.733466	4.158610	0.0002
X1	0.043341	0.041213	1.051617	0.2988
X2	1.913216	5.543092	0.345153	0.7317
X3	0.128877	0.149970	0.859352	0.3949
X4	0.495336	0.149725	3.308304	0.0019
X5	0.037425	0.076662	0.488188	0.6279

Sumber: Hasil Pengolahan data Eview

Berdasarkan tabel diatas diperoleh :

1. Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi yang dinotasikan dengan (β_1) sebesar 0.043341. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (β_1) tersebut ternyata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas (*p-value*) uji-t harus lebih kecil daripada α (alpha) = 5% atau membandingkan t-statistik yang harus lebih besar daripada t-tabel. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (β_1) memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,2988 > 0,05 ($\alpha = 5\%$) yang ditunjukan juga oleh nilai t-hitung sebesar 1.051617 < t-tabel (1,67109).

Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi yang dinotasikan dengan β_1 sebesar 0.043341 mengandung arti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 (satu) persen, maka akan mengakibatkan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan sebesar 4%

dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain di anggap konstan).

2. Diperoleh koefisien regresi variabel distribusi pendapatan yang dinotasikan dengan β_2 sebesar 1.913216. nilai koefisien variabel distribusi pendapatan (β_2) tersebut ternyata berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α (alpha) = 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas (*p-value*) uji-t yang harus lebih kecil daripada $\alpha = 5\%$, atau membandingkan t-tabel yang harus lebih kecil dari t-hitung/statistik. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa hasil uji-t untuk koefisien regresi variabel distribusi pendapatan memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,7317 > 0,05% ($\alpha = 5\%$) yang ditunjukan juga oleh nilai t-hitung/statistik sebesar 0.345153 < t-tabel (1,67109).

Koefisien regresi variabel distribusi pendapatan (β_2) sebesar 1.913216 mengandung arti bahwa apabila distribusi pendapatan meningkat 1 (satu) persen maka akan mengakibatkan kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia mengalami peningkatan

- sebesar 19%, dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).
3. Diperoleh koefisien regresi variabel tingkat pengangguran yang dinotasikan dengan β_3 sebesar 0.128877. nilai koefisien regresi variabel (β_3) tersebut ternyata berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α (alpha) = 5%. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas (*p-value*) uji-t harus lebih kecil daripada α (alpha) = 5% atau membandingkan t-statistik yang harus lebih besar daripada t-tabel. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien (β_3) memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,3949 > 0,05 ($\alpha = 5\%$) yang ditunjukkan juga oleh nilai t-statistik sebesar 0.859352 < t-tabel (1,67109)

Koefisien regresi variabel tingkat pengangguran (β_3) sebesar 0.128877 mengandung arti bahwa apabila tingkat pengangguran meningkat 1 (satu) persen maka kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 12%, dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).

4. Diperoleh koefisien regresi variabel pendidikan yang dinotasikan dengan β_4 sebesar 0.495336. nilai koefisien regresi variabel β_4 tersebut ternyata berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α (alpha) = 5%. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien β_4 memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,0019 < 0,05 ($\alpha = 5\%$) yang ditunjukkan juga oleh nilai t-statistik sebesar 3.308304 > t-tabel (1,67109) atau berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi alfa sebesar 5%.

Koefisien regresi variabel pendidikan (β_4) sebesar 0.495336 mengandung arti bahwa apabila tingkat pendidikan meningkat 1 (satu) persen maka variabel kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia meningkat sebesar 49%, dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).

5. Diperoleh koefisien regresi variabel kesehatan yang dinotasikan dengan β_5 sebesar 0.037425. nilai koefisien regresi β_5 tersebut ternyata berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α (alpha) = 5%. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas (*p-value*) uji-t harus lebih kecil daripada α (alpha) = 5% atau membandingkan t-statistik yang harus lebih besar daripada t-tabel. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien β_4 memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0079 < 0,05 ($\alpha = 5\%$) yang ditunjukkan juga oleh nilai t-statistik sebesar 2.488188 > t-tabel (1,67109) atau berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi alfa sebesar 5%.

Koefisien regresi variabel kesehatan (β_5) sebesar -0.037425 mengandung arti bahwa apabila tingkat kesehatan meningkat 1 (satu) persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia sebesar 3%, dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).

Sedangkan effect untuk masing-masing *cross section* yaitu untuk masing-masing provinsi pada Kawasan Timur Indonesia merupakan *differential intercept* dari persamaan regresi. Efek tersebut akan membedakan *intercept* untuk persamaan pada masing-masing unit *cross section*. Perbedaan *intercept* untuk masing-masing wilayah provinsi tersebut menunjukkan adanya perbedaan faktor-faktor *endowment* (sumberdaya alam dan sumberdaya manusia) dan adat istiadat setempat serta perbedaan kebijakan pemerintah masing-masing provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia terutama dalam hal pengentasan Kemiskinan serta faktor-faktor lainnya, (Gujarati, 2003).

Tabel (3). Output *Effect Spesification* pada masing-masing provinsi di Kawasan Timur Indonesia

<i>Province of Eastern Indonesia</i>	
<i>Cross Section</i>	<i>Effect Spesification</i>
Nusa Tenggara Barat	3.53
Nusa Tenggara Timur	8.74
Sulawesi Utara	-2.26
Sulawesi Tengah	2.42
Sulawesi Selatan	-1.91
Sulawesi Tenggara	1.64
Gorontalo	6.52
Sulawesi Barat	-0.81
Maluku	8.57
Maluku Utara	-4.16
Papua Barat	13.99
Papua	2.46

Sumber: Hasil Pengolahan data Eviews

Dari hasil estimasi dengan menggunakan pendekatan *fixed effect model*, diperoleh nilai *intercept* masing – masing provinsi. Adapun provinsi yang mempunyai nilai *fixed effect* yang positif dapat diartikan bahwa jika variabel bebas (*independent*) yaitu, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan dianggap konstan/tidak berubah, maka tingkat kemiskinan pada provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia akan mengalami kenaikan yakni provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8,74%, Sulawesi Tengah 2,42%, Sulawesi Tenggara 1,64%, Gorontalo 6,52%, Maluku 8,57%, Papua Barat 13,99% dan Papua 3,46%.

Sementara provinsi yang mempunyai nilai *fixed effect* yang negatif, dapat diartikan bahwa jika variabel bebas (*independent*) yaitu, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan dianggap konstan/tidak berubah, maka tingkat Kemiskinannya akan menurun yaitu untuk provinsi Sulawesi Utara 2,26%, Sulawesi Selatan 1,91%, Sulawesi Barat 0,81%, dan Maluku Utara 4,16%.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Dalam menjelaskan kondisi kemiskinan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi khususnya di negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang

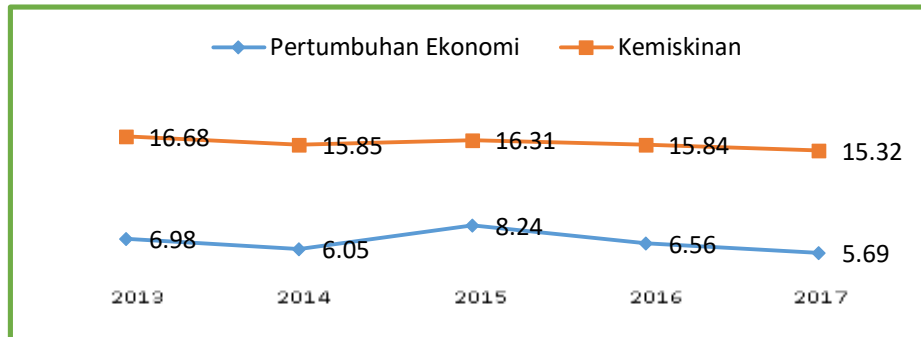
maka salah satu teori yang relevan untuk dijadikan sebagai landasan teoritiknya adalah Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty theory*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Pada intinya teori itu mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Karena rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung. Padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat.

Pada Kawasan Timur Indonesia, hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Hasil ini mengindikasikan terdapat masalah mendasar dalam proses pertumbuhan ekonomi untuk provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia, dimana bukan hanya bagaimana menumbuhkan perekonomian secara cepat namun juga terkait dengan siapa yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya dihasilkan dari ekspansi ekonomi kelompok penduduk kaya, maka manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh kelompok penduduk kaya. Hal ini berdampak pada

tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan yang semakin meningkat.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan pada Kawasan Timur Indonesia yang

menunjukkan pengaruh positif dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Gambar (2) Grafik Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia

Pada grafik diatas, terlihat dengan jelas hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Atau dengan perkataan lain, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia tidak berdampak baik bagi kesejahteraan penduduknya, justru sebaliknya mengakibatkan kemiskinan semakin tinggi.

Alasan yang mendasari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan data laju pertumbuhan ekonomi pada 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang dapat dilihat pada data BPS tahun 2018 bahwa Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada provinsi Sulawesi Tengah dan provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai infrastruktur yang lebih baik daripada provinsi lainnya.

Pertumbuhan ekonomi menjadi kurang berkualitas bila 90 persen manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh 20 persen penduduk. Sisanya, 10 persen manfaat pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh 80 persen penduduk. Pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia seharusnya melibatkan peran serta seluruh penduduk sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dan

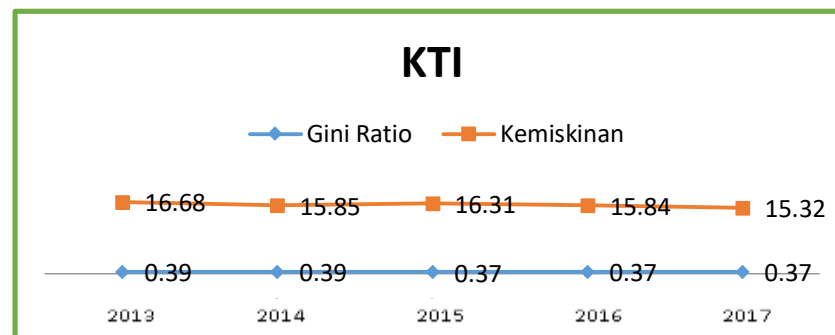
dapat terdistribusi dengan lebih merata. Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia kurang memberikan manfaat kepada penduduk miskin dan lebih banyak dinikmati penduduk menengah keatas atau Penduduk kaya dan kebanyakan tidak berdomisili di provinsi pada Kawasan Timur Indonesia. Padahal berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi bagi provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia angkanya lebih tinggi daripada rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia. Salah satu indikasi lain yang dapat dimunculkan dalam kasus pertumbuhan ekonomi di Kawasan ini adalah dana yang mengalir keluar sehingga mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan pendapat Todaro dan Smith (2006), yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberikan dampak bagi pengurangan tingkat kemiskinan sebab menurut mereka, pertumbuhan yang cepat akan berakibat buruk pada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern.

Pengaruh Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Dari hasil regresi diketahui bahwa distribusi pendapatan yang diukur dengan gini ratio memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini mengandung arti bahwa jika terjadi

peningkatan pada gini ratio maka kemiskinan pun juga akan ikut meningkat. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang atau tidak merata. Hubungan antara distribusi pendapatan dengan kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Gambar (3) Grafik Hubungan Gini Ratio dengan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia

Berdasarkan grafik pada gambar 4.2.diatas, menunjukkan bahwa gini ratio tidak menggambarkan hubungan atau pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Angka gini ratio dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami stagnasi di angka 0.3 dan masih tergolong ketimpangan rendah.

Menurut Imma Adema dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincoln Arsyad, 1997), menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di Negara Sedang Berkembang diantaranya, pertumbuhan penduduk dan ketidakmerataan pembangunan daerah. Bersandar pada data *Worldometers*, Indonesia berada diperingkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia. Dengan demikian Indonesia berpotensi menghadapi masalah ketimpangan. Pada Kawasan Timur Indonesia, ketimpangan disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan. Sebab pembangunan masih terpusat pada provinsi-provinsi yang berada pada Kawasan Barat Indonesia seperti di pulau Jawa.

Jika kita hendak mengukur tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan, selain menggunakan

kurva Lorenz, kita juga bisa menggunakan pendekatan perhitungan menurut Oshima. Berdasarkan pendekatan ini, maka provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia masuk kategori ketimpangan sedang secara rata-rata sejak periode tahun dalam penelitian ini. Meskipun demikian, pada tahun 2016, rata ketimpangan pada provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia masuk kedalam kategori ketimpangan berat yaitu sebesar 0,5. Maka ketika pemerintah lambat dalam menangani permasalahan distribusi pendapatan baik di Kawasan Timur Indonesia maka tentu upaya dalam mengentaskan kemiskinan juga akan sulit sebab jika gini ratio meningkat 1% maka akan mengakibatkan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia meningkat sebesar 19%. Bersandar pada pemikiran Bruce Herrick/Charles P Kindeleberger pada 1988, kesenjangan atau ketimpangan ini pada akhirnya akan menyebabkan si kaya semakin kaya dan si miskin makin miskin sebab pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Atmojo pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa variabel gini ratio

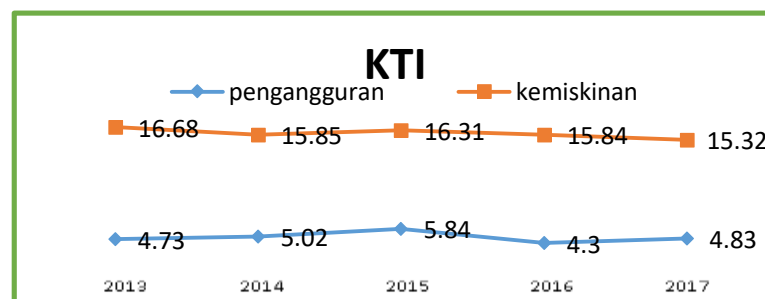
berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa apabila gini ratio naik 1% maka akan menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 2.996614.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Dari hasil regresi diketahui bahwa variabel pengangguran yang diukur dengan tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 12 provinsi di Kawasan Barat Indonesia. Hubungan ini mengandung arti bahwa jika pengangguran tinggi maka kemiskinan akan mengalami peningkatan. Masalah pokoknya terletak pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan dipengaruhi oleh investasi. Maka ketika suatu daerah yang memiliki iklim investasi yang baik maka tentu akan menyerap tenaga kerja. Keberadaan industry, perusahaan dan pabrik-pabrik tentu saja menjadi factor penting dalam memberikan peluang besar bagi para penganggur untuk melepaskan diri dari belenggu pengangguran. Namun Selain keterbatasan lapangan pekerjaan, masalah kepadatan penduduk juga menjadi factor penentu, sebab

penduduk yang terus bertambah secara tidak terkendali dapat berakibat menyempitnya peluang kerja atau meningkatnya tingkat kompetisi. Faktanya adalah masalah pengangguran di Kawasan Timur Indonesia masih ditandai dengan minimnya industry, pabrik ataupun perusahaan, sehingga sebagian besar penduduknya masih bekerja pada sektor pertanian yang sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka. Atau yang dikenal sebagai petani subsisten yakni pertanian swasembada di mana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Sadono Sukirno (2004), yang menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal tersebut mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Prastyo (2010) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hubungan antara distribusi pendapatan dengan kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Gambar (4) Grafik Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia

Berdasarkan grafik pada gambar 4.3 diatas, dapat kita lihat hubungan yang positif antara pengangguran dan kemiskinan. hubungan positif antara pengangguran dengan kemiskinan terlihat di tahun 2014 ke 2015 dan 2015 ke 2016.

Pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai. Seseorang yang menganggur tidak memiliki pendapatan dari pekerjaannya.

Kebutuhan masyarakat yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jika mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik dan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi dampaknya mereka masuk dalam kategori penduduk miskin serta

mengakibatkan membengkaknya jumlah penduduk miskin. Menurut Octaviani (2001) bahwa jumlah pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diah Retnowati pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya bahwa apabila tingkat pengangguran naik maka kemiskinan juga akan ikut naik. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa apabila tingkat pengangguran naik 1% maka akan menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 0.099.

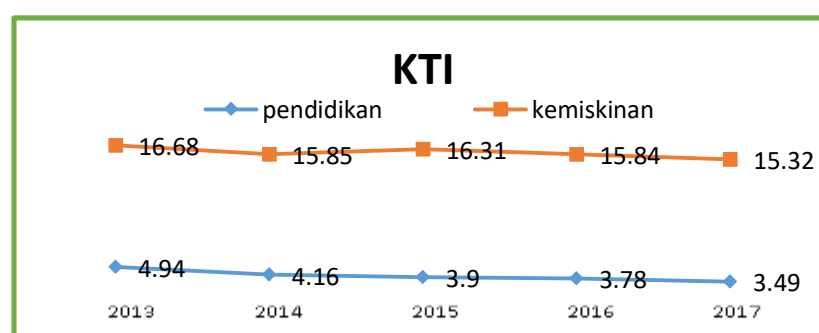
Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Dari hasil regresi diketahui bahwa variabel pendidikan yang diukur dengan Persentase penduduk buta huruf usia 15-44 tahun memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia yang meliputi 12 provinsi memiliki koefisien regresi sebesar 0.495336, mengandung arti bahwa apabila penduduk buta huruf usia 15-44 tahun meningkat 1 persen maka akan mengakibatkan kemiskinan meningkat sebesar 4%.

Variabel pendidikan dalam penelitian ini merupakan factor yang paling kuat pengaruhnya terhadap kemiskinan Kawasan Timur Indonesia. Pendidikan yang dimaksudkan tersebut meliputi rendahnya sarana prasarana, kualitas guru atau pengajar dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam memaknai pentingnya pendidikan.

Pada Kawasan Timur Indonesia yang secara geografis, daerahnya terdiri dari pulau-pulau memberi dampak pada aksesibilitas. Sebagai contoh penduduk yang berada di pelosok desa yang minim sarana prasarana. Mereka tentu akan membutuhkan biaya tambahan seperti biaya transportasi untuk menempuh pendidikan berkualitas yang berada di pusat kota. Ketika biaya tersebut tidak terpenuhi maka muncul paradigma "masa bodoh" sebab meskipun tidak sekolah mereka akan tetap bisa hidup dari alam.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan, hasilnya ada yang menunjukkan berhubungan negatif terhadap variabel kemiskinan jika pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah. Namun pada penelitian ini pendidikan diukur dengan persentase penduduk buta huruf usia 15-44 tahun, sehingga pengaruh atau hubungannya menjadi positif atau dapat berarti jika penduduk buta huruf meningkat maka kemiskinan juga ikut meningkat. Hubungan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Gambar (5) Grafik Hubungan Pendidikan (persentase penduduk buta huruf usia 15-44 tahun) di Kawasan Timur Indonesia

Berdasarkan grafik pada gambar 4.4. diatas, terlihat bahwa pada Kawasan Timur Indonesia, penurunan penduduk buta huruf memang menunjukkan pengaruh

yang cukup berarti hanya saja pada tahun 2015 kemiskinan di Kawasan tersebut mengalami kenaikan

yang cukup tinggi yang dipengaruhi oleh faktor selain faktor pendidikan (penduduk buta huruf).

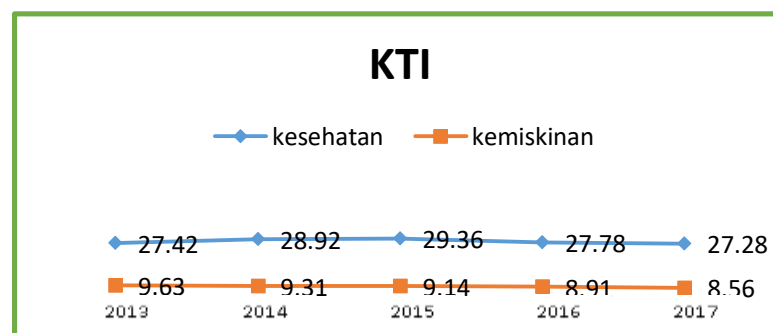
Hal penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sitepu dan Sinaga (2005) bahwa kualitas pendidikan dapat mengurangi kemiskinan. Selain itu, Rasidin dan Bonar (2004) bahwa dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari hasil regresi diketahui bahwa variabel kesehatan yang diukur dengan Persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan terakhir memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Namun jika variabel kesehatan dengan proksi diatas mengalami kenaikan 1%, maka persentase kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia yaitu 3%. Salah satu permasalahan pokoknya adalah pada Kawasan Timur Indonesia, penduduk yang memiliki keluhan kesehatan tidak lebih tinggi dari penduduk di Kawasan Barat Indonesia, hal ini disebabkan karena penduduknya yang tidak padat sementara wilayah yang dihuni masih terlampau luas seperti pulau Kalimantan dan Papua.

Sama halnya dengan variabel pendidikan, variabel kesehatan juga terdapat hubungan yang negatif maupun positif. Dalam penelitian ini variabel kesehatan diukur dengan persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan terakhir menunjukkan hubungan yang positif. Artinya bahwa jika pada suatu daerah atau kawasan tertentu penduduknya masih banyak yang memiliki keluhan kesehatan maka bisa dipastikan daerah tersebut rentan dengan kemiskinan. Hubungan yang positif antara penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dengan kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Gambar (6) Grafik Hubungan Kesehatan yang diukur dengan persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dengan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia

Berdasarkan gambar pada grafik diatas, menunjukkan bahwa kesehatan yang diukur dengan persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan selama sebulan terakhir berhubungan positif dengan kemiskinan

di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat ada tahun 2015 ke tahun 2016.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lincoln Arsyad. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa intervensi untuk memperbaiki kesehatan

dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan meningkatkan output energi. Oleh karena itu, kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Juanita (2002) menyatakan salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Di dalam pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Dengan penduduk yang sehat maka produktivitas akan meningkat pula. Meningkatnya produktivitas penduduk akan meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan di wilayah tersebut juga meningkat.

Kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan karena kesehatan merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas seseorang. Seseorang yang kondisi kesehatannya buruk, tidak akan melakukan pekerjaan dengan efektif. Jika seseorang tidak efektif dalam bekerja, maka produktivitasnya rendah. Jika produktivitas rendah, berarti penghasilannya juga rendah. Penghasilan seseorang yang rendah akan membuat orang tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga orang tersebut bisa terjebak dalam kemiskinan.

Mengingat kesehatan sangat berhubungan erat dengan kemiskinan, maka komitmen untuk membangun kesehatan yang lebih baik, tentu menjadi hal utama dalam upaya mengurangi kemiskinan, (Braveman & Gruskin, 2003).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Model regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2013 – 2017 layak digunakan karena telah memenuhi dan melewati pengujian F-statistik dan uji Hausman.
2. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2013 – 2017 menunjukkan bahwa R^2 yaitu 0,993136. nilai ini berarti model yang dibentuk sangat baik, sebab sebesar 99,31% variasi variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel-variabel independent yakni pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan sisanya 0,69% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini. Dengan demikian diperlukan juga adanya penelitian yang lebih lanjut untuk menganalisis variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.
3. Uji F statistik menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2013 – 2017 secara bersama-sama mempengaruhi variabel kemiskinan.
4. Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2013 – 2017 dapat disimpulkan bahwa pada taraf keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$), variabel pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Implikasi

1. Pemerintah harus benar-benar serius dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi dengan sikap tegas, jujur dan adil dalam mengalokasikan output pertumbuhan bagi seluruh masyarakat dan bukan hanya segelintir orang atau kelompok tertentu. Selain itu, langkah strategis yang perlu diambil adalah penerapan *trickle down effect* dan bukan *trickle up effect*, sehingga masyarakat kelas bawah dapat turut serta merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Artinya bahwa yang terpenting adalah bukan pertumbuhan ekonomi sudah tumbuh berapa persen tetapi kemiskinan sudah turun berapa persen.
2. Meskipun kesenjangan atau ketimpangan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia relatif mulai menurun dan stagnan, pemerintah tetap harus menaruh perhatian pada masalah ini melalui pendekatan wilayah dengan kebijakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Selain itu, pemerintah harus menekan laju pertumbuhan penduduk, merangsang kemampuan berwirausaha serta menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi.
3. Pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan yang padat karya khususnya untuk masyarakat pribumi. Pemerintah setempat juga harusnya merangsang para pelaku usaha local dengan jalan mengadakan pelatihan keterampilan maupun bantuan modal usaha.
4. Variabel pendidikan dalam penelitian ini merupakan satu satunya factor yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu pendidikan dapat dijadikan prioritas dalam mengentaskan kemiskinan. Sarana prasarana dan kualitas pengajar menjadi hal penting untuk ditingkatkan. Selain itu, biaya pendidikan dan sosialisasi pentingnya pendidikan terhadap masyarakat pedesaan juga penting dilakukan agar kesadaran dan semangat berpendidikan akan menjadi modal dasar bagi mereka.
5. Kesehatan menjadi faktor penting bagi sumber daya manusia dalam proses produksi. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memperhatikan sarana prasarana kesehatan atau membangun infrastruktur secara *bottom up* mulai dari pedesaan serta mensosialisasikan cara

hidup sehat dan memberikan obat-obat yang dibutuhkan secara gratis.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, Fitri. (2012). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timor Indonesia, <http://econosains.com/attachments/article/30/FTIRI.pdf>, Volume X, Nomor 2, Agustus 2012
- Amaludin's Blog: *Ekonomi & Ekonometrika*
- Arsyad, Lincoln. (2010). Ekonomi Pembangunan, edisi 5. Badan Pusat Statistik, 2012, Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012
- Braveman, P & Sofia Gruskin, (2003), *Poverty, equity, Human Rights and Health*, <http://www.who.int/bulletin/volumes/81/7/Braveman0703.pdf>, Bulletin of the World Health Organization 2003, 81 (7)
- Dasgupta. Partha, *The Economic of Poverty in Poor Countries*
- Faturrohmin, Rahmawati, (2011), *Pengaruh PDRB, Harapan Hidup, Melek Huruf terhadap tingkat Kemiskinan (study kasus 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah)*, fakultas ekonomi dan bisnis, tidak dipublikasi
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, (2008), *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Online at http://www.pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/PROS_2008_MAK3.pdf. Diakses tanggal 15 Januari 2011.
- Hadiyanti, Puji (2006). *Kemiskinan & Upaya Pemberdayaan masyarakat*
- Ikhtisar, (2006). Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, The World Bank Office Jakarta
- Jonaidi, Arius. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia
- Kusini, D.E dan Setiawan, (2010), *Ekonometrika*
- Nachrowi, Djalal, (2006). Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan.
- Permana, Anggit Yoga, (2012), *Analisis pengaruh PDRB, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang tidak dipublikasi
- Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga. (2004). *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium*. Online at <http://www.ejournal.unud.ac.id/?module=detailp>

- enelitian&idf=7&idj=48&idv=181&idi=48&idr=19. Diakses tanggal 15 Januari 2011.
- Saputra, Wishnu Adhi, (2011), *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, tidak di publikasi
- Suliswanto, M.S.Wahyudi, (2010), *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia*, http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/viewFile/981/1048_umm_scientific_journl, di akses tanggal 2 desember 2010
- Sari, Ayula C.D.M. (2012). *Pengaruh Kepemilikan Aset, Pendidikan, Pekerjaan dan Jumlah Tanggungan terhadap kemiskinan Rumah tangga di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. fakultas Ekonomika dan bisnis Universitas Diponegoro Semarang, tidak dipublikasi
- Suliswanto, M.S.Wahyudi, (2010), *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia*, http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/viewFile/981/1048_umm_scientific_journl, di akses tanggal 2 desember 2010
- Swastika, Dewa.K.S dan Yana Supriyatna. (2006). *The Characteristic of poverty and its alleviation in Indonesia. Karakteristik dan penanggulangannya di Indonesia*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- Ucha, Chimobi. (2010). *Poverty in Nigeria : Some Dimensions and Contributing Factors*. Global Majority E-Journal, Vol. 1, No. 1 (June 2010), pp. 46-56
- Wijayanto, Ravi Dwi, (2010), *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah tahun 2005 – 2008*, fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, tidak dipublikasi
- Wongdesniwati, (2009). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*. Diakses tanggal 7 Desember 2009.
- Yudha, Okta RP. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011*. Skripsi Jurusan
- Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang